

1. Perkembangan inflasi daerah dan atau perkembangan harga barang kebutuhan pokok dan penting, barang lainnya dan jasa serta risiko ke depan.

1. Perkembangan Inflasi Daerah dan Atau Perkembangan Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Jasa Lainnya, Serta Resiko Kedepan.

Perkembangan inflasi di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan pada Triwulan IV Tahun 2025 menunjukkan dinamika harga yang berfluktuasi pada sejumlah komoditas strategis, khususnya komoditas pangan. Secara umum, kondisi inflasi masih relatif terkendali, meskipun terdapat tekanan harga pada beberapa komoditas tertentu.

- a. Perkembangan Harga Bulan Oktober 2025

Pada bulan Oktober 2025, beberapa komoditas pangan mengalami kenaikan harga, antara lain beras medium (Rp14.750/kg), daging ayam ras (Rp35.000/kg), telur ayam ras (Rp33.000/kg), cabai merah (Rp38.000/kg), cabai rawit (Rp30.000/kg), minyak goreng (Rp18.000/liter), dan gula pasir (Rp18.000/kg).

Sementara itu, beberapa komoditas mengalami penurunan harga, seperti bawang merah (Rp45.000/kg), bawang putih (Rp40.000/kg), tepung terigu (Rp13.000/kg), tomat (Rp8.000/kg), dan mie instan (Rp3.500/bungkus).

Komoditas lainnya relatif stabil, seperti daging sapi (Rp130.000/kg), tempe bungkus (Rp15.000/kg), tahu mentah (Rp2.000/biji), pisang lokal (Rp7.000/sisir), susu bubuk (Rp 50.000), susu balita (Rp 45.000). Secara keseluruhan, kondisi inflasi pada Oktober 2025 masih dalam kategori aman dan terkendali.

- b. Perkembangan Harga Bulan November 2025

Pada bulan November 2025, sebagian besar harga bahan pokok relatif stabil dengan beberapa penyesuaian harga. Bawang merah turun menjadi Rp43.000/kg. Namun demikian, harga beras medium, daging ayam ras, minyak goreng, gula pasir, dan komoditas lainnya relatif stabil. Secara umum, perkembangan inflasi pada November 2025 masih tergolong terkendali meskipun terdapat tekanan harga pada komoditas hortikultura tertentu.

- c. Perkembangan Harga Bulan Desember 2025

Pada bulan Desember 2025, tekanan inflasi meningkat seiring dengan tingginya permintaan menjelang hari besar keagamaan dan akhir tahun. Cabai rawit mengalami lonjakan harga yang tidak begitu tinggi Rp55.000/kg, bawang merah Rp60.000/kg.

Beberapa komoditas mengalami penurunan dan beberapa komoditi lain juga harganya tetap stabil. Kondisi ini menyebabkan inflasi pada Desember 2025 berada pada level yang cukup stabil dibandingkan pada bulan-bulan sebelumnya. Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan melalui arahan Bupati tetap melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke pasar dan distributor guna memastikan ketersediaan barang dan mencegah penahanan stok yang dapat memicu kenaikan harga.



## Resiko Inflasi ke Depan

Resiko inflasi ke depan dipengaruhi oleh:

- Ketergantungan pasokan beras dan hortikultura dari daerah lain.
- Faktor cuaca yang memengaruhi produksi pertanian dan perikanan.
- Peningkatan permintaan pada momen hari besar keagamaan.
- Keterbatasan sistem logistik dan distribusi di wilayah kecamatan terpencil.

## 2. Identifikasi permasalahan pengendalian inflasi di daerah.

### 2. Identifikasi Permasalahan Pengendalian Inflasi di Daerah.

Permasalahan utama dalam pengendalian inflasi di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan pada Triwulan IV Tahun 2025 dipengaruhi oleh faktor struktural, geografis, serta dinamika pasokan dan distribusi komoditas pangan strategis. Secara rinci, permasalahan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

#### a. Tingginya Ketergantungan Pasokan Pangan dari Luar Daerah

Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan hingga saat ini masih sangat bergantung pada pasokan beras dan beberapa komoditas pangan strategis lainnya dari daerah sentra produksi di luar wilayah kabupaten. Ketergantungan ini menyebabkan stabilitas harga di daerah sangat rentan terhadap gangguan pasokan, baik yang disebabkan oleh penurunan produksi di daerah pemasok, kendala distribusi, maupun peningkatan permintaan secara regional.

Kondisi tersebut berdampak langsung pada fluktuasi harga di tingkat konsumen, terutama pada saat terjadi keterlambatan pasokan atau penurunan volume distribusi. Selain itu, keterbatasan cadangan pangan daerah juga menyebabkan ruang intervensi pemerintah daerah menjadi terbatas ketika terjadi gejolak harga.

#### b. Keterbatasan Kapasitas Penyimpanan dan Sistem Distribusi Pangan

Keterbatasan infrastruktur penyimpanan dan distribusi pangan, khususnya untuk komoditas hortikultura yang bersifat mudah rusak (perishable), menjadi salah satu tantangan utama dalam pengendalian inflasi daerah. Minimnya fasilitas penyimpanan yang memadai, seperti gudang penyimpanan dan cold storage, menyebabkan komoditas hortikultura harus segera dipasarkan dalam waktu singkat.

Akibatnya, ketika terjadi gangguan distribusi atau penurunan pasokan akibat faktor cuaca dan transportasi, harga komoditas tersebut dengan cepat mengalami kenaikan di pasar. Selain itu, kondisi geografis wilayah dan keterbatasan sarana transportasi antar kecamatan turut memengaruhi kelancaran distribusi barang, sehingga meningkatkan biaya logistik yang pada akhirnya berdampak pada harga jual di tingkat konsumen.

#### c. Fluktuasi Harga Musiman Komoditas Hortikultura

Fluktuasi harga pada komoditas cabai dan bawang merupakan permasalahan yang bersifat struktural dan berulang, terutama pada periode perubahan musim dan menjelang hari besar keagamaan. Faktor cuaca yang tidak menentu berpengaruh terhadap produktivitas pertanian, sementara pola tanam yang belum sepenuhnya terkoordinasi menyebabkan pasokan tidak



merata sepanjang tahun.

Selain faktor produksi, keterbatasan distribusi dan panjangnya rantai pasok turut memperbesar volatilitas harga di tingkat konsumen. Kondisi ini menyebabkan komoditas cabai dan bawang menjadi penyumbang utama tekanan inflasi pada periode tertentu, sehingga memerlukan perhatian dan intervensi kebijakan yang lebih terencana dan berkelanjutan.

### 3. Pelaksanaan kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

#### 3. Pelaksanaan Kebijakan Pengendalian Inflasi di Daerah

Dalam rangka menindaklanjuti permasalahan pengendalian inflasi di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan pada Triwulan IV Tahun 2025, Pemerintah Daerah melalui Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) telah melaksanakan berbagai kebijakan strategis yang terkoordinasi dan berkelanjutan. Kebijakan tersebut diarahkan untuk menjaga keterjangkauan harga, menjamin ketersediaan pasokan, memperlancar distribusi, serta meningkatkan efektivitas komunikasi kebijakan kepada masyarakat.

##### a. Stabilisasi Harga dan Pemenuhan Kebutuhan Pangan Masyarakat

Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan secara konsisten melakukan upaya stabilisasi harga di pasar guna menekan tekanan inflasi, khususnya pada komoditas pangan strategis. Salah satu langkah utama yang dilakukan adalah menjalin kerja sama dengan Perum Bulog dalam pelaksanaan kegiatan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) beras di sejumlah titik strategis, terutama pada wilayah yang mengalami tekanan harga cukup tinggi.

Selain itu, pemerintah daerah juga menyalurkan bantuan beras kepada kelompok masyarakat penerima manfaat yang telah terdata, sebagai bentuk perlindungan sosial dan upaya menjaga daya beli masyarakat berpenghasilan rendah. Kebijakan ini diharapkan dapat membantu pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat sekaligus menahan laju kenaikan harga beras di tingkat konsumen.

Sebagai dasar pengambilan kebijakan, pemerintah daerah secara berkelanjutan melakukan pengumpulan dan pemutakhiran data serta informasi perkembangan harga bahan pokok dan barang kebutuhan pokok lainnya di tingkat kecamatan dan kabupaten. Data tersebut menjadi instrumen penting dalam mendeteksi potensi gejolak harga secara dini dan merumuskan langkah intervensi yang tepat sasaran.

##### b. Pengawasan Harga, Pemantauan Stok, dan Penguatan Sistem Logistik

Pengawasan dan pemantauan harga komoditas pangan terus dilakukan secara intensif oleh anggota TPID, khususnya melalui peran Dinas Perindustrian dan Perdagangan serta Dinas Ketahanan Pangan. Kegiatan ini bertujuan untuk mengidentifikasi secara cepat komoditas yang mengalami kenaikan harga signifikan, terutama komoditas pangan yang memiliki andil besar terhadap inflasi daerah.

Apabila teridentifikasi adanya lonjakan harga yang tidak wajar, TPID dapat segera melakukan langkah-langkah intervensi, antara lain melalui koordinasi dengan distributor, pelaksanaan



operasi pasar, serta penyaluran pasokan tambahan ke wilayah terdampak. Selain itu, pengawasan ini juga dilakukan untuk mencegah praktik penimbunan barang dan memastikan kelancaran distribusi bahan pokok di pasar.

Dalam rangka mendukung stabilitas harga secara berkelanjutan, pemerintah daerah juga berupaya meningkatkan dan memperkuat sistem logistik di tingkat kecamatan dan kabupaten. Upaya tersebut meliputi peningkatan koordinasi antar perangkat daerah terkait, optimalisasi jalur distribusi, serta penguatan peran pelaku usaha lokal dalam rantai pasok pangan. Dengan sistem logistik yang lebih efisien, diharapkan biaya distribusi dapat ditekan sehingga harga di tingkat konsumen menjadi lebih stabil.

#### 4. Evaluasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

##### 4. Evaluasi Kebijakan Pengendalian Inflasi di Daerah

Evaluasi kebijakan pengendalian inflasi di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan pada Triwulan IV Tahun 2025 dilakukan untuk menilai efektivitas pelaksanaan program dan kebijakan TPID dalam menjaga stabilitas harga serta mengendalikan tekanan inflasi daerah. Evaluasi ini mencakup capaian kinerja, efektivitas intervensi kebijakan, serta tingkat koordinasi antar perangkat daerah yang terlibat.

##### a. Efektivitas Kebijakan Stabilisasi Harga dan Perlindungan Daya Beli Masyarakat

Upaya pemerintah daerah dalam menekan laju inflasi menunjukkan hasil yang cukup positif. Hal ini tercermin dari menurunnya Indeks Perkembangan Harga (IPH) Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan pada bulan Januari dan Februari setelah periode Triwulan IV Tahun 2025, sebagaimana tercatat dalam data Kementerian Dalam Negeri. Penurunan IPH tersebut mengindikasikan bahwa tekanan harga yang sempat meningkat pada akhir tahun dapat dikendalikan secara bertahap melalui intervensi kebijakan yang tepat.

Pelaksanaan kegiatan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) beras di beberapa titik strategis, serta penyaluran bantuan beras kepada kelompok masyarakat penerima manfaat, terbukti efektif dalam menjaga ketersediaan pangan dan menahan kenaikan harga beras di tingkat konsumen. Selain itu, kebijakan tersebut berkontribusi dalam menjaga daya beli masyarakat, khususnya kelompok berpenghasilan rendah, sehingga dampak inflasi terhadap kesejahteraan masyarakat dapat diminimalkan.

##### b. Kinerja TPID dalam Pemantauan Harga dan Koordinasi Kebijakan

Sebagai bagian dari upaya pengendalian inflasi daerah, TPID Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan secara konsisten melaksanakan pengawasan dan pemantauan harga komoditas pangan di seluruh pasar yang ada di wilayah kabupaten. Kegiatan pemantauan harga telah dilaksanakan secara terstruktur, terjadwal, dan terkoordinasi oleh perangkat daerah terkait, sehingga menghasilkan data harga yang akurat, terkini, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Data hasil pemantauan tersebut dimanfaatkan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan kebijakan, baik untuk menentukan langkah intervensi jangka pendek maupun sebagai bahan evaluasi dan perencanaan kebijakan pengendalian inflasi jangka menengah. Selain itu, koordinasi antar-SKPD yang tergabung dalam TPID berjalan dengan baik, tercermin dari



keselarasan program dan respons cepat terhadap potensi gejolak harga di pasar.

Secara umum, pengendalian harga oleh TPID Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan pada Triwulan IV Tahun 2025 dapat dikatakan berhasil, ditunjukkan oleh keterkendalian inflasi daerah dan efektivitas berbagai program strategis yang dilaksanakan. Keberhasilan ini tidak terlepas dari penguatan koordinasi lintas sektor, komitmen pimpinan daerah, serta dukungan kebijakan yang konsisten dan berkelanjutan.

## 5. Rekomendasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

### 5. Rekomendasi Kebijakan Pengendalian Inflasi di Daerah

Dalam rangka menjaga keberlanjutan pengendalian inflasi serta mengantisipasi potensi tekanan harga ke depan, Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan melalui Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) perlu terus memperkuat kebijakan yang bersifat preventif, responsif, dan terintegrasi lintas sektor. Rekomendasi kebijakan pada Triwulan IV Tahun 2025 disusun dengan mempertimbangkan kondisi aktual daerah, evaluasi kinerja TPID, serta arah kebijakan nasional pengendalian inflasi.

#### a. Dinas Perindustrian

##### 1. Penguatan Survei dan Pemantauan Harga Bahan Pokok

Dinas Perindustrian dan Perdagangan perlu melakukan survei harga bahan pokok dan barang penting lainnya secara rutin dan terstruktur di seluruh pasar tradisional dan sentra distribusi di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan. Kegiatan ini bertujuan untuk memperoleh data harga yang akurat, terkini, dan representatif sebagai dasar pengambilan kebijakan pengendalian inflasi. Selain itu, hasil survei harga diharapkan dapat menjadi instrumen early warning system dalam mendeteksi potensi kenaikan harga secara dini.

##### 2. Pengawasan Distribusi Barang Bersubsidi dan Komoditas Strategis

Pengawasan terhadap distribusi dan harga pupuk, pestisida, serta barang bersubsidi lainnya perlu terus ditingkatkan guna mencegah kelangkaan, penyimpangan distribusi, dan praktik penjualan di atas harga eceran tertinggi (HET). Selain itu, pengawasan distribusi LPG 3 kg di seluruh pangkalan harus dilakukan secara konsisten untuk memastikan ketersediaan dan keterjangkauan harga bagi masyarakat yang berhak menerima. Langkah ini diharapkan dapat meminimalkan potensi tekanan inflasi yang bersumber dari komoditas energi dan input produksi pertanian.

#### b. Dinas Pertanian dan Dinas Ketahanan Pangan

##### 1. Koordinasi Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi

Dinas Pertanian dan Dinas Ketahanan Pangan perlu memperkuat koordinasi dengan Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KP3) Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan dalam rangka mengantisipasi potensi kelangkaan pupuk dan pestisida bersubsidi di tingkat petani. Ketersediaan input produksi pertanian yang memadai sangat berpengaruh terhadap kelancaran produksi pangan dan stabilitas harga komoditas di pasar.



## 2. Penguatan Ketersediaan dan Cadangan Stok Pangan Daerah

Pemerintah daerah perlu melakukan pemantauan secara berkala terhadap ketersediaan stok pangan strategis di wilayah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, baik yang berasal dari produksi lokal maupun pasokan antar-daerah. Selain itu, penguatan cadangan pangan pemerintah daerah menjadi langkah penting dalam meningkatkan kemampuan intervensi ketika terjadi gangguan pasokan atau lonjakan harga, khususnya pada komoditas beras.

## 3. Stabilisasi Harga Beras dan Komoditas Pangan Strategis

Dalam rangka menjaga stabilitas harga beras di pasaran, Dinas Pertanian dan Dinas Ketahanan Pangan perlu terus berkoordinasi dengan Perum Bulog dan pihak terkait lainnya untuk memastikan kelancaran distribusi beras serta pelaksanaan program stabilisasi harga, seperti SPHP. Pemantauan harga beras secara berkelanjutan di tingkat pasar menjadi penting agar potensi kenaikan harga dapat segera direspons melalui kebijakan yang tepat dan terukur.